

PROFIL HARGA PRODUK KELAPA SETELAH PAKET JUNI 1991

Artikel : 4

Penulis : Mulni Erfa

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri

PENDAHULUAN

Seluas 97% areal perkebunan kelapa di Indonesia merupakan perkebunan rakyat yang melibatkan sekitar enam juta petani, 21% dari jumlah penduduk yang bekerja di lapangan pertanian berada di sub sektor perkebunan kelapa rakyat (Anon., 1988). Namun demikian, keadaan perkembangan harga produk kelapa (kopra dan minyak kelapa) di dalam negeri dari tahun ke tahun cukup memprihatinkan, terutama oleh karena adanya fluktuasi harga yang tajam dan variasi harga antar daerah. Adanya substitusi dari minyak kelapa sawit juga ikut menyebabkan masalah perkelapaan menjadi semakin berat.

Merosotnya harga tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) sistem pemasaran kelapa dan produk kelapa di dalam negeri belum efektif dan efisien, sehingga margin tataniaga menjadi besar dan biasanya cenderung merugikan produsen/petani, (2) adanya kebijaksanaan pembatasan ekspor kopra menyebabkan pasar domestik menjadi pasar tunggal yang monopsonistik yang cenderung akan mengeksploitasikan produsen/petani, (3) belum berkembangnya diversifikasi produk dan diversifikasi usahatani kelapa yang memadai, sehingga produsen/petani kelapa tidak memiliki alternatif yang cukup untuk mengantisipasi penurunan harga kopra. Di sisi lain beberapa produk kelapa berpeluang untuk ditingkatkan produksinya seperti gula merah, desiccated coconut, santan awet, pekatan protein dan lain-lain (Nuhung, 1991).

Dampak lain dari rendahnya harga adalah turunnya produktivitas. Di berbagai daerah di Indonesia sudah terlihat adanya gejala kurang serius menangani pertanaman kelapa. Input yang diberikan terhadap budidaya kelapa, sebagaimana lazimnya suatu usahatani yang

layak hampir tidak ada (terutama untuk saprodi), alokasi biaya dicurahkan hanya untuk tenaga kerja saja, sama sekali tidak ada alokasi biaya untuk pupuk, pemberantasan hama dan penyakit, pestisida dan lain sebagainya. Kondisi ini disebabkan oleh asumsi budidaya kelapa tidak lagi menarik (Androecia *et al.*, 1990). Menurut Hasni dkk., (1989) alokasi biaya yang dikeluarkan tersebut terbatas hanya untuk kegiatan panen dan sebagian kecil untuk pasca panen.

PAKET JUNI 1991 UNTUK TATA NIAGA KELAPA

Situasi yang kurang menguntungkan petani kelapa tercermin dari kondisi harga beberapa tahun belakangan ini, seperti pada tahun 1988 harga kopra dan minyak kelapa masing-masing adalah Rp 464/kg dan Rp 939/kg (Tabel 1). Tahun berikutnya harga turun dan sampai pada tahun 1990 harga terus merosot menjadi Rp 255/kg untuk kopra dan Rp 629/kg untuk minyak kelapa. Bahkan menurut Utomo (1991) di daerah sentra produksi kelapa Propinsi Riau (Kabupaten Indragiri Hilir), harga kopra pada bulan Oktober tahun tersebut hanya Rp 120/kg.

Penurunan harga kopra dan minyak kelapa sampai pada tingkat yang rendah ini, tidak hanya mengkhawatirkan petani tetapi juga pemerintah. Keadaan yang sulit tersebut tidak dapat dikedalikan lagi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Untuk menyelamatkan keadaan, pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan dengan mengeluarkan paket Juni 1991 yang salah satu tujuannya merupakan langkah terobosan di sektor pertanian dalam rangka deregulasi di sektor riil. Pada prinsipnya paket Juni 1991 bertujuan: (1) membuka peluang ekspor produk-produk kelapa, sehingga daerah-daerah

Tabel 1. Perkembangan harga kopra dan minyak kelapa (1986 - 1991)

Tahun	1986 (Rp)	1987 (Rp)	1988 (Rp)	1989 (Rp)	1990 (Rp)	1991 (Rp)
Kopra di tingkat :						
Petani (Sulut)	270	374	464	439	255	303
Pabrik (Sulut)	281	402	530	515	305	660
Konsumen (Surabaya)	343	468	622	587	399	516
Minyak kelapa Af Pabrik (Jawa)	557	720	939	900	629	807

Sumber: Anon., 1992

sentra produksi seperti Sulawesi Utara boleh mengeksport langsung tanpa harus melewati pelabuhan Surabaya, (2) menghapuskan Dana Rehabilitasi Kelapa, (3) bebas bersaing dengan kelapa sawit.

Pengaruh Pakjun 1991 cukup besar terhadap peningkatan harga kopra dan minyak kelapa, setelah terjadi penurunan harga berturut-turut sejak tahun 1989. Hasil observasi terhadap kondisi harga pada bulan-bulan berikutnya setelah adanya pakjun, memperlihatkan bahwa mulai dari bulan Juli sampai dengan November 1991 harga produk-produk tersebut mulai meningkat walaupun tidak konsisten. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) adanya perubahan situasi pasar, (2) terbukanya peluang pasar luar negeri, hal tersebut merangsang eksportir untuk melakukan ekspor, (3) adanya permintaan yang besar terhadap kopra dan minyak kelapa dari luar negeri.

PROFIL HARGA SEBELUM DAN SESUDAH PAKET JUNI 1991

Di dalam tulisan ini dikemukakan harga-harga yang terjadi di tingkat petani, di tingkat pabrikan dan di tingkat konsumen. Berhubung Propinsi Sulawesi Utara merupakan sentra produksi utama di Indonesia, maka harga-harga tersebut mengacu kepada harga yang terjadi di Sulawesi Utara. Untuk harga di tingkat konsumen, harga yang dipakai adalah harga yang

berlaku di Surabaya, hal ini disebabkan sebagian besar perdagangan antar Pulau Sulawesi Utara dilaksanakan dengan Surabaya. Umumnya konsumen di Surabaya adalah sektor pabrikan, jadi harga di tingkat konsumen yang dimaksud bukanlah merupakan konsumen akhir.

Harga kopra baik di tingkat petani, di tingkat pabrik maupun di tingkat konsumen pada tahun 1991 terus mengalami peningkatan. Kalau diperhatikan lebih jauh, data yang ada pada Tabel 2 akan menjelaskan sebagai berikut: di tingkat petani harga kopra rata-rata sebelum Pakjun Rp 286/kg, sedangkan setelah Pakjun harga rata-ratanya Rp 385.4/kg. Berarti terjadi kenaikan sebesar Rp 99.4 atau sekitar 34.8%. Harga kopra rata-rata di tingkat pabrik sebelum Pakjun adalah Rp 338/kg sedangkan setelah Pakjun harga rata-ratanya menjadi Rp 464.2/kg, kenaikan adalah sebesar Rp 126.2 atau 37.3%. Di tingkat konsumen harga rata-rata sebelum Pakjun Rp 433.2/kg sedangkan setelah Pakjun harga rata-ratanya meningkat menjadi Rp 609.4/kg, yaitu naik sebesar Rp 176.2 atau 40.7%.

Di lain pihak harga minyak kelapa juga mengalami peningkatan, rata-rata harga sebelum Pakjun Rp 705/kg sesudah Pakjun menjadi Rp 926.8/kg, naik sebesar Rp 221.8 atau 31.5%. Dengan demikian, baik untuk kopra maupun minyak kelapa terjadi kenaikan harga. Kopra merupakan produk utama yang dihasilkan oleh petani kelapa, sehingga pergeseran pergeseran harga yang terjadi merupakan suatu kajian yang menarik. Selisih harga rata-rata

Tabel 2. Perkembangan harga kopra dan minyak kelapa (1991)

Bulan	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)
Kopra di tingkat :											
Petani (Sulut)	264	267	283	310	306	310	351	388	373	390	425
Pabrik (Sulut)	313	319	342	360	356	365	421	457	443	480	520
Konsumen (Surabaya)	419	413	451	440	443	465	553	557	549	688	700
Minyak kelapa Af Pabrik (Jawa)	674	675	758	708	710	720	835	836	827	946	1190

Sumber : Anon., 1992

antara di tingkat pabrikan dengan di tingkat petani sebelum Pakjun adalah Rp 52/kg (Rp 338/kg Rp 286/kg). Sedangkan setelah Pakjun sebesar Rp 78.8/kg (Rp 464.2/kg Rp 385.4/kg). Artinya, perbedaan harga di tingkat petani dibandingkan dengan di tingkat pabrikan setelah Pakjun semakin membesar. Dengan demikian pedagang perantarapun (penghubung petani-pabrikan) menikmati kenaikan sebesar Rp 26.8/kg (Rp 78.8/kg-Rp 52/kg) atau 51.5%.

Dari ketiga pelaku pasar tersebut, yaitu petani, pedagang perantara dan pabrikan tidak semua diuntungkan dengan adanya Pakjun. Naiknya harga bagi petani dan pedagang merupakan suatu tambahan pendapatan. Tetapi, tidak demikian halnya dengan pabrikan. Bagi pabrikan kopra merupakan bahan setengah jadi yang harus diolah lebih lanjut untuk dijadikan minyak kelapa (minyak goreng). Jika harga input naik maka harga output juga harus naik.

Dari observasi harga selama tahun 1991, harga output (minyak kelapa) ternyata juga ikut naik, ini konsekuensi logis dari naiknya harga input. Bagi pabrikan, secara psikologis mereka lebih senang harga input rendah, sehingga harga jual produk dapat ditekan, yang pada akhirnya memperbesar omzet penjualan dan dapat dijangkau oleh konsumen.

KESIMPULAN

Dituangkannya kebijaksanaan Paket Juni 1991 oleh pemerintah, telah mampu mencipta-

kan suasana kearah terciptanya suatu mekanisme tataniaga yang memperlihatkan kecenderungan terjadinya peningkatan harga, dimana pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Situasi harga di tahun 1991 sesudah bulan Juni (Juli s/d November) dibandingkan dengan sebelum bulan Juni (Januari s/d Mei), di tingkat petani terjadi kenaikan harga kopra sebesar 34.8%, di tingkat pabrik sebesar 37.3%, sedangkan untuk harga minyak kelapa naik sebesar 31.5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Androecia, S.Damanik, dan E.Karmawati., 1990. Keragaan perkelapaan di Sumatera Barat. Prosiding Temu Tugas Perkebunan/Tanaman Industri lingkup Propinsi Sumbar, Riau dan Jambi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri. p 81-94.
- Anonymous., 1988. Coconut Statistical Year Book. Asian and Pacific Coconut Community. Jakarta-Indonesia.
- _____, 1992. Laporan Direktorat Jenderal Perkebunan, dalam Surat Kabar Jayakarta, Edisi 11 April 1992.
- Hasni H., M.Djafar, dan R.Rahman., 1989. Alokasi penggunaan tenaga kerja pada usahatani kelapa. Buletin Balitka No.7. Manado. p 19-23.

